

B A B V

PARPOL ISLAM DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN

A. Percaturan Politik pada masa Demokrasi Terpimpin

Setelah Soekarno mengambil alih penuh kekuasaan pemerintah dengan kembali ke UUD 1945 di tahun 1959, sebagai suatu perbuatan tegas untuk mengakhiri pertentangan-pertentangan politik yang berlarut-larut yang semakin hari semakin merusak ketuhanan bangsa dan negara. Paling kurang dalam memberikan penilaian yang kurang memuaskan terhadap tingkah laku partai-partai politik. Sementara ABRI pada waktu itu sependapat dengan Soekarno. Dengan dekrit dan berlakunya kembali UUD 1945, dimulailah periode Soekarno dengan Demokrasi Terpimpinnya. Pada masa itu pimpinan pemerintahan dan Angkatan Bersenjata berada di tangan Soekarno. Bahkan demi kesatuan komando sesuai dengan prinsip Demokrasi Terpimpin semuanya berada di tangan Presiden. Pimpinan rakyat secara formal kepada Presiden. Dengan demikian kekuasaan akan terpusat ke tangan Soekarno. Hak otonomi Soekarno semakin kuat bahkan menjadi penentu bagi kehidupan politik. Sedangkan kekuatan politik lainnya menjadi lumpuh, karena tergesar oleh demokrasi Soekarno.¹

Sebagaimana telah kami terangkan pada bab terdahulu, bahwa tindakan/langkah Soekarno dalam melaksanakan Demokrasi Terpimpin, langkah pertamanya adalah membentuk kabinet kerja yang dipimpin lang-

¹Choirul Anas, Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama, Jatyu, Solo, 1985, hal. 220.

sung oleh Presiden Soekarno. Kemudian mengadakan tindakan-tindakan yang bersifat konstitusional yaitu membentuk MPRS sebagai ganti MPR hasil pemilu 1955, sejalan dengan itu dibentuk pula Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Kemudian DPAS menetapkan pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" sebagai Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kemudian pada tahun 1960 membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong DPRGR). Kemudian pada bulan Februari 1960 dilaksanakan kongres Pemuda Indonesia, pidato Presiden yang terkenal dengan istilah USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia). Oleh DPS dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari MANIPOL. Dan USDEK merupakan langkahnya.

Dengan munculnya Soekarno sebagai pemain utama dalam arena politik Indonesia dalam periode ini pada permulaannya diharapkan sebagai orang yang akan membawa perubahan-perubahan penting sehingga proses kemerosotan politik bisa dihambat atas dasar mana pembinaan suatu sistem politik yang baik dapat dilaksanakan.²

Setelah Presiden Soekarno berhasil menguasai seluruh jaringan politik, maka Presiden Soekarno mempunyai kekuasaan dalam melaksanakan kebijaksanannya. Sesuai dengan ide Soekarno, untuk memperlancar jalannya Demokrasi Terpimpin, maka yang dijadikan tema sentral dari kehidupan politik dan kenegaraan adalah "Revolusi". Sebagai konsekwensinya maka kepentingan revolusi dijadikan titik sentral pertimbangan di dalam memecahkan

² Alfian, Beberapa Masalah Pembaharuan Politik di Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta, 1981, hal. 9.

problematis-problematika nasional dalam bidang politik, ekonomi, budaya dan Hankam. Karena itu sering kita dengar ungkapan-ungkapan yang sloganistik revolusioner. Dan kesemuanya itu berporoskan NASAKOM (Nasionalisme, Agama, Komunis).³ Nasakom ini diwujudkan di seluruh jaringan lembaga negara baik DPAS, DPR-GR, Fron Nasional maupun di lembaga-lembaga lainnya.⁴

Tujuan adanya NASAKOM tersebut adalah untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Sebetulnya keinginan Soekarno untuk mempersatukan bangsa Indonesia baik di kalangan Nasionalisme, Agama maupun Marxisme/Komunisme ini dimulai sejak jaman pergerakan Nasional Kemerdekaan Indonesia.⁵ Dan ini baru terrealisir setelah ia dapat memegang seluruh jaringan kekuasaan dengan sistem politik yang yaitu Demokrasi Terpimpin.

Konsep Nasakom ini merupakan hasil pikiran Soekarno yang asli. Seperti telah ia akui sendiri, bahwa ide mempersatukan bangsa Indonesia dalam bentuk Nasakom itu tidak terlepas dari kepribadiannya sendiri. Soekarno sendiri pernah mengatakan sebagaimana yang telah ditulis oleh Ichsan Cholid dalam bukunya yang berjudul "Mendayung dalam Taufan" yang berbunyi :

Saya ini orang campuran, ya theis, ya nasionalis, ya percaya kepada Tuhan, ya cinta kepada tanah air, ya cinta kepada nasionalisme Oleh sebab itu, saya yakin Nasakom merupakan proses proses persatuan Indonesia.⁶

³ Cosmos Batu Bara, dalam Buku Pai Winda Orde Baru, BP. Bharu Bhakti, Jakarta, Cet. IV, 1984, hal. 10.

⁴ Choirul Anom, op. cit., hal. 222.

⁵ Soekarno, Pi bawah Bendera Revolusi, di bawah Bendera Revolusi, Jakarta, Cet. IV, t.t., hal. 3.

⁶ Choirul Anom, loc. cit.

Mengapa Bung Karno memakai istilah NASAKOM, Sebab kalau memakai istilah NASAMAX jangan-jangan nanti orang orang PSI juga ikut-ikut dalam NASAMAX ini, saudara-saudara padahal mereka adalah kontra Revolusioner tulen padahal mereka adalah pencoreng dari pada Marxis.⁷

Demikian itulah tekad Soekarno untuk merealisasikan konsep Nasakomnya, dan pada waktu itu tidak ada satu pun partai politik yang berani menghalang-halangi kehendak Soekarno. Dan seandainya ada yang menghalang-halangnya maka ia harus menerima resiko. Bahkan menurut pengamatan Alfian, bahwa kondisi pada masa itu benar-benar telah membuat kekuatan partai politik menjadi lumpuh kecuali PKI dan ABRI, di samping Soekarno sendiri sebagai pemegang kunci kekuasaan dan keseimbangan di antara kedua kekuatan.

Perwira-perwira Militer, khususnya Angkatan Darat (AD) yang memegang pimpinan ABRI memang terkenal anti Komunis (PKI). Sikap anti Komunis militer ini antara lain jelas terlihat dalam usahanya dalam menghalangi orang PKI memasuki kabinet. Sikap yang berkawan dengan ide Soekarno ini mengakibatkan memburuknya hubungan antara militer dengan Soekarno. Ketidaksenangan militer terhadap PKI ini dianggap oleh Soekarno sebagai komoniste phobi dari sikap pemimpin militer.⁸

Program lain dari Manipol ialah mengadakan retuling terhadap aparatur di semua lembaga pemerintah, termasuk alat kekuasaan negara (Angkatan Darat, Angkatan

⁷Pidato Presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1963.

⁸Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta, 1980, hal. 42.

Mengapa Bung Karno memakai istilah NASAKOM, Sebab kalau memakai istilah NASAMAX jangan-jangan nanti orang orang PSI juga ikut-ikut dalam NASAMAX ini, saudara-saudara padahal mereka adalah kontra Revolusioner tulen padahal mereka adalah pencoreng dari pada Marxisme.⁷

Demikian itulah tekad Soekarno untuk merealisasikan konsep Nasakomnya, dan pada waktu itu tidak ada satu pun partai politik yang berani menghalang-halangi kehendak Soekarno. Dan seandainya ada yang menghalang-halangnya maka ia harus menerima resiko. Bahkan menurut pengamatan Alfian, bahwa kondisi pada masa itu benar-benar telah membuat kekuatan partai politik menjadi lumpuh kecuali PKI dan ABRI, di samping Soekarno sendiri sebagai pemegang kunci kekuasaan dan keseimbangan di antara kedua kekuatan.

Perwira-perwira Militer, khususnya Angkatan Darat (AD) yang memegang pimpinan ABRI memang terkenal anti Komunis (PKI). Sikap anti Komunis militer ini antara lain jelas terlihat dalam usahanya dalam menghalangi orang PKI memasuki kabinet. Sikap yang bertentangan dengan ide Soekarno ini mengakibatkan semburatnya hubungan antara militer dengan Soekarno. Ketidaksenangan militer terhadap PKI ini dianggap oleh Soekarno sebagai konsekuensi phobi dari sikap pemimpin militer.⁸

Progres lain dari Manipol ialah mengadakan retelling terhadap aparatur di semua lembaga pemerintah, termasuk alat kekuasaan negara (Angkatan Darat, Angkatan

⁷ Pidato Presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1963.

⁸ Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta, 1980, hal. 42.

Laut, Angkatan Udara, Polisi).⁹

Dalam pelaksanaan retuling itu, maka konsep gotong royong telah berkembang menjadi gotong royong nasional yang mencakup semua kelompok baik dari kalangan nasionalis, kelompok agama maupun kelompok Komunis (Nasakom), sebagaimana yang dikehendaki PKI. Memang PKI merupakan tangan kanan dari pada Presiden Soekarno.

Secara politis PKI merasa kuat dan mampu menghadapi musuh-musuhnya yang dianggap akan menghalang-halangi kegiatan mereka. Begitulah akhirnya pada pertengahan tahun 1960 PKI mencoba kekuatannya untuk menghadapi TNI-AD dengan mengadakan kritikan-kritikan dan menuduh TNI-AD tidak serius dan kurang sungguh-sungguh dalam menumpas pemberontakan PRRI/Permesta. Di samping itu PKI mengadakan pengacauan di daerah yakni di Sumatera Selatan, di Kalimantan Selatan, dan di Sulawesi Selatan. Peristiwa ini dikenal dengan "Peristiwa Tiga Selatan".¹⁰

Melihat kritikan dan tuduhan itu, maka pimpinan TNI-AD merasa tersinggung. Kemudian oleh TNI-AD dibalas dengan cara menghentikan dan membekukan kegiatan PKI sesuai dengan Undang-undang keadaan Bahaya yang pada saat itu sedang berlaku. Selain itu TNI-AD memerintahkan untuk menangkap pimpinan PKI dan melarang mas media PKI untuk terbit dan beredar. Dan menyarakon Presiden Soekarno untuk bersikap waspada kepada sikap PKI dan tidak terlalu percaya terhadap PKI. Tetapi tanggapan Presiden Soekarno terhadap tuntutan TNI-AD tersebut ti-

⁹Departemen Penerangan RI., Tujuh Bahan Pokok, hal. 48.

¹⁰Nugroho Woto Susanto, Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1987, hal. 5

dek menghirenken tapi malah sebaliknya memperingatkan TNI-AD supaya tidak berakap phobi terhadap PKI.¹¹

Tindakan ABRI menolak PKI untuk ikut dalam kabinet itu sangat memukul perasaan Soekarno yang sudah sejak lama sekali menginginkan persatuan nasional dengan slogan Nasakom. Dan itu dianggap oleh Soekarno sebagai komunisme phobi. Dan itu dipertegas oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 17 Agustus 1960, di mana Presiden mengutuk orang-orang yang komunisme phobi.¹²

Kerenggangan ABRI dengan Presiden Soekarno itu dimanfaatkan oleh PKI. Sehingga tingkah laku politik Presiden Soekarno selalu memberikan kesempatan kepada PKI. Politik luar negerinya semakin condong ke kiri dan politik dalam negerinya tampak semakin memihak kepada PKI. Dalam suasana semacam ini Presiden dan PKI berusaha memasukkan pengaruh politiknya ke dalam tubuh ABRI. Usaha tersebut cukup berhasil sebagai digambarkan pada perkembangan yang terjadi yang terjadi di tubuh AU, KKO di masa itu. Unsur-unsur Komunis dan pendukung politik Presiden Soekarno relatif berhasil mempengaruhi kedua angkatan tersebut. Usaha ini sebagai usaha untuk menyaingi peranan dominan yang diemban Angkatan Darat. Dengan lain perkataan usaha Soekarno itu dianggap sebagai kegiatan memecah belah kelompok militer agar dengan demikian bisa lebih mudah dikendalikannya. Akibat selanjutnya ialah bahwa militer akan menjadi semakin lemah sehingga dalam suasana itu Soekarno dan juga PKI,

¹¹ Ibid.

¹² Choirul Anas, op. cit., hal. 224.

akan lebih mudah menasukkan pengaruhnya ke dalam.¹³

Menang PKI sendiri mempunyai ide yang sejalan dengan Soekarno yaitu berusaha untuk menasakamkan pimpinan Militer dalam arti bahwa aliran-aliran politik yang ada dalam nasakom, terwakili di dalamnya. Tentu saja ini adalah dalam rangka mempercepat proses peran sertanya PKI dalam pemerintahan. Usaha ini berhasil dengan dukungan resmi Panglima Angkatan Darat Jendral Ahmad Yani di tahun 1964, yang menyatakan, bahwa secara resmi AD. mendukung Nasakom.¹⁴

Tetapi PKI tidak berhenti di situ saja ia berusaha terus walaupun mendapat tentangan dari sana-sini, ia berusaha terus untuk mengacaukan tubuh ABRI. Terutama semenjak Dr. Subandrio menjabat sebagai Kepala Badan Pusat Inteljen (BPI) di tahun 1962 dan apalagi setelah PM. Djuanda meninggal pada tahun 1963 dan diganti oleh Dr. Subandrio, fitnah-fitnah yang dilakukan oleh PKI terhadap ABRI terutama kepada TNI-AD semakin memuncak.

Salah satu fitnahannya atau salah satu tipu muslihat yang dilakukan PKI dalam rangka menjatuhkan martabat ABRI khususnya TNI-AD adalah menelorkan apa yang disebut "dokumen Gilchrist", yakni sebuah telegram rahasia dari duta besar Inggris, Gilchrist, kepada Harold Caccia dari Kementerian Luar Negeri Inggris, yang kemudian jatuh ke tangan agen-agen PKI. Kemudian oleh PKI dikirimkan secara keleng kepada Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio yang isinya seolah-olah ada persekutuan antara Washington dan London untuk melakukan serangan ke-

¹³ Alfian, op. cit., hal. 43.

¹⁴ Choirul Anam, op. cit., hal. 225.

pada Indonesia, yang melibatkan sejumlah Perwira TNI-AD kemudian oleh Subandrio dilaporkan kepada Presiden Soekarno dan diperbanyak untuk disebarluaskan ke seluruh negara Asia Afrika atau negara lain yang bersahabat yang maksudnya bahwa Indonesia dalam keadaan bahaya.

Di samping itu PKI menuduh, bahwa TNI-AD akan mengadakan "Dewan Jendral" yang anti Soekarno dan pro Imperialisme khususnya Amerika Serikat. Dengan demikian seolah-olah kedudukan dan keselamatan Presiden dan keamanan negara serta bangsa terancam dari bahaya.¹⁵

Demikian itulah sebagian usaha PKI dalam rangka merebut kekuasaan dari tangan ABRI supaya ABRI tidak mempunyai kekuatan politik, karena memang sebelumnya dengan masuknya ABRI ke dalam masalah politik PKI mulai khawatir dan takut menghadapi ABRI sehingga satu-satunya jalan yang dilakukan oleh PKI adalah mendekat Soekarno dan melentarkan fitnah terhadap ABRI khususnya TNI-AD. Sehingga dengan demikian kedudukan Soekarno sebagai pemegang kunci keseimbangan dan kekuatan politik semakin kuat dan kokoh.

Sedangkan dari kalangan partai politik selain PKI sengaja dibuat tidak berdaya sehingga tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Bahkan parpol/ormas yang dicap tidak revolusioner dituduh menghambat jalannya Revolusi.¹⁶ Dalam arti parpol yang tidak mau mendukung terhadap konsep Presiden Soekarno sebagai pemimpin besar Revolusi dalam rangka melancarkan jalannya Demokrasi Terpimpin, maka parpol/ormas itu dicap sebagai penghambat jalannya Demokrasi Terpimpin.

¹⁵ Ibid., hal.

¹⁶ Cosmos Batu Bara, loc. cit.

Jangan heran kalau Soekarno merangkul PKI dalam rangka melaksanakan konsepnya yaitu Demokrasi Terpimpin, karena Soekarno sendiri mengatakan dalam peringatan ulang tahun Dekrit ke 4 pada tanggal 5 Juli 1963 yang diberi judul "Konsepnya Sendiri Jangan Menjiplak", ia mengatakan : Bukanlah satu barang aneh, bahwa pemerintah Republik Indonesia merangkul PKI, bahwa saya sebagai Mandataris MPRS merangkul PKI, bahwa saya sebagai pemimpin besar Revolusi Indonesia merangkul PKI, sebab siapa yang bisa membantah bahwa PKI adalah unsur yang hebat dalam penyelesaian Revolusi Indonesia.¹⁷ Di samping itu PKI mempunyai konsekuensi progresif revolusioner.¹⁸

Semakin lama PKI semakin merasa kuat, karena program-programnya sudah menjadi program pemerintah. Langkah berikutnya PKI merubah taktik perjuangannya, seperti yang diputuskan dalam kongres nasional pada bulan April 1962 antara lain ditekankan : "PKI memandang pekerjaan dalam parlemen sebagai pekerjaan terpokok dan tidak pula menganggapnya sebagai satu-satunya bentuk perjuangan. PKI mendasarkan politiknya atas analisa marxis mengenai keadaan yang kongkrit dan perimbangan kekuatan".¹⁹

Dari pernyataan di atas jelas bahwa PKI dalam perjuangannya tidak lagi melalui parlemen tetapi beralih kepada perjuangan dengan senjata cara lain. Dalam rangka memperoleh keseimbangan kekuatan PKI mula-mula melakukan operasi manipulasi dan lama-kelamaan operasi-

¹⁷Departemen Penerangan RI., Pidato Presiden tanggal 5 Juli 1963, hal. 6.

¹⁸Ibid., hal. 17.

¹⁹Nugroho Noto Susanto, op. cit., hal. 6.

manipulasi itu ditingkatkan menjadi ofensif revolusioner terhadap semua kekuatan sosial politik yang tidak mereka senangi. Di samping itu PKI merangkul golongan Partindo yang pada mulanya berasaskan marhaenismanya Soekarno. Dan ini rupanya telah disetujui oleh Soekarno. Sebab Marhaenisme adalah asas di dalam segala halnya menyelamatkan kaum marhaen. Dan Marhaenisme adalah cara perjuangan yang revolusioner yang sesuai dengan watak kaum Marhaen.²⁰

Selama tahun 1964 terdapat beberapa aksi yang dilakukan oleh PKI antara lain :

1. Gerakan riset di Kecamatan-kecamatan
2. Aksi pensitaan milik Inggris dan Amerika Serikat
3. Aksi rituling, tuntutan penggantian pejabat yang anti PKI, aksi tunjuk hidung
4. Pengindonesiasan Marxisme
5. Aksi-aksi sepihak.²¹

Dalam waktu meningkatnya aksi-aksi yang dilancarkan oleh PKI itu, Presiden Soekarno berpidato pada tanggal 17 Agustus 1964 yang berjudul "Tahun Vivero Pericoloso (Tahun yang menyerempet-nyerempet bahaya). Dalam pada itu PKI seakan-akan mendapat dukungan dari Presiden Soekarno.

Aksi-aksi yang dilancarkan oleh PKI itu didasarkan atas program rahasia yang berjudul "Resone Program dan kegiatan PKI dewasa ini yang telah dibentuk pada tahun 1963. Program ini merupakan program jangka pendek, dan ini merupakan rencana aksi yang merupakan tujuan akhir dari pada PKI. Revolusi dianggap tidak selesai

²⁰ Ibid., hal. 7.

²¹ Ibid., hal. 10.

sebelum Indonesia terwujud Demokrasi Rakyat. Dan belum dikatakan berhasil sebelum semua golongan berada di pihak PKI.²²

Dengan terbentuknya dokumen rahasia itu menyebabkan terjadinya ketegangan antar partai. Partai-partai lain semakin mencurigai iktikad baik PKI. Tapi PKI tenang karena Presiden Soekarno menyetujuinya. Untuk menanggapi ini Presiden Soekarno memanggil pimpinan partai politik ke Istana Bogor untuk mengatasi persengketaan antar partai. Dan pada tanggal 12 Desember 1964 para pemimpin partai politik itu menanda tangani suatu deklarasi yang disebut "Deklarasi Bogor". Deklarasi itu dianggap sebagai suatu kebulatan tekad partai-partai. Sehingga dengan demikian masalahnya sudah dianggap selesai.²³

Di bidang luar negeri dijalankan politik luar negeri yang bebas aktif tapi mengutamakan proses Jakarta-Hanoi-Pyongyang-Peking. Politik konfrontasi dengan Malaysia dijalankan karena Malaysia merupakan proyek NEROLIM yang melakukan pengepungan terhadap Indonesia.

Dengan adanya politik luar negeri yang berporoskan Jakarta-Hanoi-Pyongyang-Peking ini memberikan peluang bagi PKI untuk bisa menempati posisi yang lebih kuat. Dan dengan dalih melawan NEROLIM Malaysia di Lubang Buaya telah dilakukan latihan-latihan militer bagi sukarelawan yang terdiri dari sukarelawan PKI.

Kesempatan itulah akhirnya oleh PKI dipakai sebagai suatu kesempatan untuk mengadakan aksi besar dalam rangka mengambil alih kekuasaan di Indonesia yang

²² Ibid.

²³ Ibid., hal. 11.

dikenal dengan peristiwa gerakan 30 September 1965 oleh PKI (G.30 S/PKI).²⁴

B. Peranan Umat Islam dan Pendukung Demokrasi Terpimpin

Dalam masa Demokrasi Terpimpin partai-partai politik sengaja dibuat oleh Presiden Soekarno tidak berdaya sehingga tidak dapat menyampaikan aspirasinya secara baik. Walaupun begitu umat Islam masih mempunyai peranan dalam masa Demokrasi Terpimpin terutama dalam menghadapi PKI yang pada waktu itu sempat mendominasi kekuasaan dan sempat mempengaruhi Presiden Soekarno, sehingga Presiden Soekarno lebih condong ke kiri. Dalam keadaan yang demikian itulah umat Islam yang diwakili oleh partai-partai politiknya yang masih sempat hidup dan bisa bernafas pada waktu itu, di samping itu juga tokoh-tokoh Islam berusaha untuk membendung pengaruh PKI. Di samping itu organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, Jam'iyatul Wasliyah, GPII dan lain-lain juga sempat mempunyai peranan atau setidaknya ikut andil dalam pemerintahan. Dengan banyaknya umat Islam yang ada dalam pemerintahan itulah sehingga langkah politik yang dilancarkan oleh PKI akan mudah diketahui. Dalam hal ini ABRI pun juga tidak tinggal diam, pada waktu itu ABRI bersama umat Islam berjuang mati-matian menghadapi PKI.

Pada masa Demokrasi Terpimpin partai-partai Islam yang masih dapat bernafas antara lain: NU, PSII, Perti. Dalam kesempatan itu NU berusaha untuk menghalau kegiatan-kegiatan yang dilakukan PKI karena NU mengetahui bahwa arah partai politik Indonesia pada waktu itu condong ke kiri, maka NU segera mengadakan

²⁴Cosmos Batu Bara, op. cit., hal. 10.

80
80
konsolidasi organisasi.

Perlawanan NU terhadap PKI dilakukan di seluruh medan juang, ketika PKI menggerakkan massanya, maka NU juga mengorganisasi Anshar menjadi "Banser" yang lebih militan. Pada waktu PKI menyajikan lagu genjer-genjer yang penuh hasutan dan sindiran, NU mengorbankan shalawat Bader. Pada waktu PKI menggerakkan Lekranya, NU mengaktifkan Lesbuminya. Dan NU mengobarkan semangat perlawanan terhadap PKI sebagai kelanjutan peristiwa Madiun.²⁵

Kebencian NU terhadap PKI mencapai puncaknya ketika PKI melancarkan aksi-aksinya secara kasar, keras dan radikal di tahun 1964 yang terkenal dengan "aksi sepihak" yang dilakukan oleh kader-kader PKI terutama oleh aktivis-aktivis BTI (Barisan Tani Indonesia). Mereka secara sepihak memaksa pembagian tanah dan hasil pertanian kepada petani-petani di berbagai desa khususnya di Jawa. Dengan aksi-aksi sepihak ini mungkin PKI mempunyai tujuan politik, baik di kalangan masyarakat desa maupun di kalangan atas.

Dengan aksi sepihak itu NU telah merasakan semakin terdesak dan terancam dan merasakan akibat buruk bagi dirinya, maka NU merasa perlu mengadakan perlawanan keras dan menghadangnya dengan kekuatan maksimal.²⁶

Di samping itu keikutsertaan pemuda Anshar dan massa NU lainnya dalam rangka menghadang aksi-aksi sepihak tersebut. Kemudian keikutsertaan NU bersama massanya bergerak bersama ABRI menampas pemberontakan G 30 S/

²⁵ Syarifuddin Zuhri, K.H. Wahab Hasbullah Banak dan Pendiri NU, Yasuna, Jakarta, 1974, hal. 75.

²⁶ Alfian, op. cit., hal. 5.

PKI pada tahun 1965.

Partai Islam yang lain adalah Masyumi. Masyumi merupakan partai Islam yang terbesar pada waktu itu, akan tetapi partai ini tidak dapat hidup lama dalam masa Demokrasi Terpimpin. Ia dibubarkan pada tahun 1960.

Peranan Masyumi pada masa prolog dan awal Demokrasi Terpimpin adalah besar sekali bahkan partai ini terkenal dengan partai yang paling agresif terhadap ide ide Soekarno yang tidak sesuai dengan sistim demokrasi. Sebab Masyumi merupakan pelopor Demokrasi dan penegak sistim demokrasi pada waktu itu.

Banyak pengamat yang menunjukkan bahwa salah satu kesalahan Masyumi itu karena berpegang teguh kepada nilai-nilai demokrasi, sementara PKI dan Bung Karno sendiri sangat tidak menghargai aturan permainan demokrasi, sehingga Masyumi rela berkorban kekuatan-kekuatan anti demokratik dan otoriter.^{27 22}

Partai Islam yang dapat disebut memperjuangkan Islam di Indonesia terbukti hanya Masyumi. Masyumi secara gigih memperjuangkan Islam dalam Konstituante dan secara gigih menentang PKI. Sikap anti Komunis itu terbukti jelas ketika panggung politik Indonesia masih diramiskan dengan multi partai yang cukup banyak dulu itu, dengan jelas sekali Masyumi tidak percaya dengan Komunis. Sehingga Masyumi tidak pernah mau duduk dalam kabinet yang ada unsur-unsurnya Komunis. Kekhawatiran Masyumi terhadap PKI (Komunis) itu terbukti dengan munculnya peristiwa 6 30 S/PKI pada tahun 1965.^{28 29}

²⁷ M. Anien Rais, Tiga Priestasi Masyumi, dalam Majalah Serial Media Dakwah, nomor 161 Rebiul Awal 1408/November 1987, hal. 17.

²⁸ Ibid.

Dalam rangka menegakkan demokrasi, Natsir dalam salah satu pidatonya pada tahun 1956 mengatakan; bahwa apabila partai-partai sampai terkubur demokrasi pun juga turut masuk ke liangnya sekalian. Dan yang berdiri di atas kuburan itu adalah diktator. Diktator adalah anti demokrasi. Adanya partai politik menurutnya merupakan unsur penting dalam kehidupan demokrasi. Adanya partai politik menurutnya merupakan unsur yang penting dalam kehidupan demokrasi.²⁹

Natsir pun juga mengesakan sistim demokrasinya Soekarno. Ia menyebutnya sebagai demokrasi terkungkung. Dan ia mengatakan penghapusan demokrasi sejati, menurut istilah Presiden Soekarno Demokrasi Liberal itu pada hakekatnya adalah diktator.³⁰

Menurut Natsir, demokrasi yang harus ditegakkan ialah yang tidak mengambang yang tidak menghasilkan kekecewaan dan anarki, tetapi yang "terpimpin" bukan berarti sistimnya harus diawasi dan diarahkan oleh pemimpin atau beberapa orang tapi pemeluk, pendukung dan pelaksana sistim demokrasi itu. Terpimpin atau terbimbing oleh nilai-nilai moral dan hidup yang tinggi.³¹

Sedangkan partai-partai yang lain tidak banyak bicara dan kebanyakan suaranya diwakili oleh NU. Demikian itulah sebagian peranan umat Islam pada masa Demokrasi Terpimpin dalam rangka meluruskan jalannya pemerintahan yang pada waktu itu agak condong ke kiri.

Di samping partai-partai politik dan beberapa

²⁹ Ibid., hal. 23.

³⁰ Ibid.

³¹ Deliar Noer, op. cit., hal. 356.

83
83

tekok juga banyak organisasi-organisasi Islam yang bersifat sosial yang mempunyai peranan dalam masa Demokrasi Terpimpin yaitu antara lain :

Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) yaitu sekelompok pemuda yang erat dengan Masyumi. Pada masa awal Demokrasi Terpimpin GPII ini turut aktif dalam badan kerjasama antara pemuda dan militer (BKSPM) yang didirikan tahun 1957. Walaupun Masyumi tidak setuju dengan masalah ini. Sebab Masyumi menganggap bahwa hal itu akan berakibat pengakuan terhadap peranan militer. Di samping itu yang lebih serius lagi yaitu turut sertanya seorang anggota pimpinan GPII Dahlan Renuwiharjo dalam DPR-GR sebagai anggota yang diangkat oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960. ³² 32

Al Jami'iyatul Wasliyah dan Muhammadiyah merupakan organisasi yang besar di Indonesia dalam bidang sosial, agaknya organisasi ini pada akhir Demokrasi Terpimpin dipengaruhi oleh perkembangan keadaan yang meningkatkan kedudukan Soekarno, mereka bertambah aktif.

Selama masa Demokrasi Terpimpin Muhammadiyah akan mengubah statusnya dari organisasi sosial menjadi organisasi politik, walaupun suaranya dapat dikalahkan oleh suara yang menghendaki tetap sebagai organisasi sosial. Tetapi Muhammadiyah terus berusaha terutama setelah mendengar Masyumi dibubarkan pada tahun 1960. Dan memungkinkan Muhammadiyah berjuang dalam politik karena setelah Masyumi bubar, penyaluran aspirasi lewat NU, PSII ataupun Perti sudah tidak mungkin. NU dan Perti berbeda paham PSII tidak mungkin. Akhirnya Muhammadiyah

² Ibid., hal. 370.

Ry
84

memasukkan anggotanya dalam DPR-GR. Ia juga sebagai anggota Front Nasional, Muhammadiyah juga turut dalam berbagai kegiatan untuk mendukung kebijaksanaan pemerintah.³³ 33

Di samping itu ada juga satu organisasi yang erat hubungannya dengan Masyumi yaitu Serikat Buruh Islam Indonesia yang berganti nama Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (Garpindo). Tahun 1960 ketuanya Yusuf Wibisono melepaskan diri dari Masyumi dengan alasan biele terikat dengan Masyumi, kepentingan anggotanya akan terombang-ambing. Dan akhirnya Yusuf Wibisono duduk dalam DPR-GR sebagai wakil dari SBII/Garpindo.³⁴ 34

Pada umumnya organisasi-organisasi tersebut masih ingin melanjutkan hubungannya dengan Masyumi walau informal. (Lihat Abadi 1 dan 7 Oktober 1959 mengenai sikap persatuan Islam dan Al Jam'iyatul Islamiyah terhadap Masyumi).³⁵ 35

Di dalam membicarakan peranan pendukung Demokrasi Terpimpin dalam hal ini adalah peranan ABRI, Soekarno dan PKI.

Peranan ABRI dalam Demokrasi Terpimpin adalah bahwa setelah ABRI dapat memasuki gelanggang politik pada masa itu, maka ABRI mempunyai banyak peran dalam menentukan jalannya pemerintahan pada masa itu, dan yang paling terlihat adalah usahanya dalam menghalau tindakan-tindakan kaum Komunis yang pada waktu itu condong untuk merubah Indonesia menjadi negara Komunis. Yang

³³Ibid., hal. 371 - 372.

³⁴Ibid., hal. 373.

³⁵Ibid., hal. 374.

mencapai puncaknya pada bulan September 1965 yang terkenal dengan peristiwa 30 S/PKI.

Dapat dikatakan bahwa pada masa Demokrasi Terpimpin kekuatan politik berada di tangan Soekarno, Komunis dan ABRI. Ketiga kekuatan ini saling bersaing satu sama lain.³⁶ 36

Peranan ABRI dalam menghancurkan PKI antara lain adalah bahwa usaha-usaha PKI untuk menguasai TNI yang sudah dimulai sejak jaman kemerdekaan itu semakin lama semakin terbuka. Kecemburuan PKI terhadap TNI semakin meruncing. Hal itu terjadi pada waktu itu pemerintah nasionalisasikan semua perusahaan milik Belanda dalam rangka perjuangan membebaskan Irian Jaya. Hal ini PKI sangat berambisi sekali untuk menempatkan orang-orangnya pada perusahaan-perusahaan itu. Usaha yang lain, PKI secara diam-diam mengintensifkan pemasukan kader-kadernya menjadi tatanan dan Bintara ABRI dalam usaha mencari perimbangan kekuatan. Di bidang Legislatif, perimbangan kekuatan itu gagal dengan terbentuknya DPR-GR sebab dalam DPR-GR itu, wakil-wakil ABRI mencapai 35 orang, sedang PKI hanya 30 orang, maka dari itu PKI secara gila menentang golongan fungsional ABRI masuk dalam DPR-GR.

Untuk menjaga perimbangan kekuatan itu Presiden Soekarno mengadakan reorganisasi dan integrasi dalam tubuh ABRI. Dalam hal ini ABRI ditempatkan di bawah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang yang dibentuk oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KASAB) dan para Panglima Angkatan. Maka dengan itu Presiden Soekarno

³⁶ M. Rusli Korum, Perjalanan Partai Politik di Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 10.

akan lebih mudah merangkul salah satu angkatan dipihaknya dalam rangka mendukung politiknya. Dengan politik merangkul itu menyebabkan persaingan antara Angkatan yang satu dengan lainnya. Tiap-tiap Angkatan berlomba untuk menjadi yang paling revolusioner dan paling dekat dengan pimpinan besar revolusi. Dalam keadaan yang demikian inilah PKI melancarkan politiknya yaitu politik adu domba antar angkatan. Akhirnya lahirnya di tubuh Angkatan Laut. Gerakan Perwira Progresif Revolusioner (GPPR) yang sudah memasukkan pengaruh PKI.³⁷

Untuk mengatasi keadaan yang demikian ini akhirnya Angkatan Darat mengambil inisiatif untuk menyusun doktrin perjuangan baik mengenai kekaryaan maupun mengenai kedudukan ABRI sebagai alat Hankam. Doktrin TNI AD itu dikenal dengan "TRI UBAYA CAKTI", yang dihasilkan oleh seminar TNI-AD pada tanggal 2-9 April 1965.³⁸

Dalam rangka menghadapi PKI yang pada waktu itu mendapat kesempatan baik dan mendapat dukungan dari Presiden Soekarno, militer telah bekerjasama dengan umat Islam yang sama-sama anti terhadap Komunis. Kerja sama antara umat Islam dengan ABRI itu terlihat jelas ketika PKI melancarkan suatu pemberontakan yang kedua kalinya yang terjadi pada tanggal 30 September 1965.

Dengan diakuinya ABRI sebagai salah satu kekuatan atau unsur fungsional di dalam sistem politik melalui proses kembalinya Indonesia ke UUD 1945 di tahun 1959 itu telah memantapkan peranan ABRI yang sebenarnya sudah pernah mereka lakukan di jaman Revolusi dan praktis mereka pikul kembali semenjak diumumkan keadaan

³⁷ Nugroho Noto Susanto, op. cit., hal. 17.

³⁸ Ibid.

87

bahaya di tahun 1957. Di samping itu mereka juga menjadi sebuah organisasi bersenjata yang anti Komunis. Sikap anti Komunis Militer ini antara lain jelas terlihat dalam usahanya menghalangi orang-orang PKI masuk kabinet atau pemerintahan.³⁹ 39

Adapun peranan PKI dalam Demokrasi Terpimpin, sebagaimana penulis uraikan pada bab yang terdahulu bahwa PKI mempunyai peranan besar pada masa Demokrasi Terpimpin. Pada masa itu PKI selalu mendapat peluang serta diandalkan oleh Presiden Soekarno sehingga PKI dapat duduk di berbagai tempat, bahkan apa yang dilontarkan oleh PKI selalu mendapat tanggapan baik dari Presiden Soekarno. Sehingga dari situlah PKI menjadi kuat dan merupakan penentu dari jalannya pemerintahan pada waktu itu. Dan kalau diperhatikan bahwa semua kebijaksanaan Soekarno selalu menguntungkan PKI. Seperti Nasakom, Dewan Nasional, DPR-GR dan lain sebagainya banyak menguntungkan PKI karena PKI dapat duduk dalam dewan tersebut dan menduduki bagian yang penting.

Dalam bidang Hankam, PKI mempunyai gagasan untuk membentuk Angkatan V yaitu mempersenjatai rakyat, kaum buruh, dan kaum tani, gagasan ini diperoleh PKI dari RSC. Dan gagasan ini diterima baik oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya dengan terbentuknya Angkatan V ini para sukarelawan yang telah melakukan latihan-latihan di Lubang Buaya dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia itu diselenggarakan oleh PKI dan akhirnya para sukarelawan ini ikut serta dalam penculikan dan pembunuhan beberapa PTA Angkatan Darat pada tanggal 30 September 1965.⁴⁰ 40

³⁹ Alfian, op. cit., hal. 42.

⁴⁰ Cosmas Batu Bara, op. cit., hal. 10.

Dengan diangkatnya oknum PKI menjadi Menteri (seperti Nyoto), komunikasi antara PKI dengan Presiden Soekarno menjadi semakin meluas. Gejala yang terlihat sejak tahun 1961 itu berkembang terus sedemikian rupa sampai-sampai Bung Karno menyuruh Nyoto untuk menyusun rancangan pidato kenegaraannya untuk disampaikan pada tanggal 17 Agustus 1965. Padahal seperti diketahui umum bahwa pidato Presiden merupakan garis kebijaksanaan yang tidak dapat ditawar lagi.⁴¹ Dari situ jelas bahwa PKI dapat mengelabui Presiden Soekarno sehingga Presiden Soekarno sangat percaya diri dengan PKI.

Adapun peranan Presiden Soekarno dalam masa Demokrasi Terpimpin adalah besar sekali. Yaitu ia adalah pencetus ide Demokrasi Terpimpin dengan slogan Nasakom, dan dengan dalih Revolusi, untuk mengatasi kebocoran politik yang terjadi pada masa Demokrasi Liberal. Soekarno di samping sebagai Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, Pemimpin Besar Revolusi juga merupakan penentu jalannya pemerintahan pada waktu itu. Ia adalah pemimpin yang bersifat otoriter, bahkan diktator. Semua pidatonya merupakan suatu keputusan yang tidak dapat ditawar lagi dan lain sebagainya. Dewan Nasional, DPR-GR, MPRS, DPA, diketusi sendiri oleh Soekarno. Sehingga dari situ jelas bahwa Bung Karno pada waktu itu sangat berperan sekali. Tapi sayang kebijaksanaan - kebijaksanaan Bung Karno banyak menuju ke kiri yaitu lebih condong ke pada Komunis. Sehingga setiap kebijaksanaan Bung Karno selalu menguntungkan PKI. Menurut Bung Karno PKI adalah satu-satunya partai yang paling progresif revolusioner. Dengan kebijaksanaan Bung Karno yang banyak menguntungkan

⁴¹ Majalah Kiblat, 20 September - 5 Oktober 1987, hal. 28.

ken PKI itu menjadikan PKI semakin kuat, akhirnya kekuatan itu dipakai kesempatan untuk mengambil-alih kekuasaan di Indonesia, yang mencapai puncaknya pada peristiwa 30 S/PKI tahun 1965.

C. Pembubaran Masyumi

Sebelum Masyumi dibubarkan, memang Masyumi mempunyai sikap yang agresif terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan Presiden Soekarno. Sejak Soekarno mengeluarkan konsepsinya untuk merubah Demokrasi Liberal menjadi Demokrasi Terpimpin pada tahun 1957, dan untuk kembali ke UUD 1945, Masyumi secara tegas menolak konsepsi tersebut, sebab Masyumi memandang; bahwa itu tidak konstitusional, bahkan tidak hanya Masyumi saja yang memandang tidak konstitusional tetapi para negarawan lain juga berpikir seperti itu.

Dan masih banyak lagi kebijaksanaan-kebijaksanaan Soekarno yang selalu mendapat tantangan dari Masyumi. Karena kebijaksanaan Soekarno itu terlalu condong ke kiri dan tidak sesuai lagi dengan azas Demokrasi. Sedang Masyumi sebagai partai politik Islam yang besar selalu menonjolkan ciri Desokratis dan anti Komunis.

Sebagaimana telah penulis uraikan pada bab yang telah lalu, bahwa Masyumi sebagai wakil umat Islam berjuang mati-matian dalam bidang Konstituante untuk mendirikan negara Islam di Indonesia setidaknya negara yang berideologi Islam.

Dengan adanya sikap Masyumi yang demikian itu, maka pada waktu Soekarno berhasil mengambil seluruh kekuatan politik di tangannya dengan Demokrasi Terpimpinnya, maka Masyumi sengaja dikucilkan dari DPR-

90
90

GR pada bulan April 1960. Mengingat susunan DPR-GR tidak lagi didasarkan atas perkembangan kekuatan partai-partai politik/organisasi yang dihasilkan pemilu 1955, melainkan diatur sedemikian rupa oleh Presiden Soekarno untuk menjamin adanya kerja sama secara gotong royong antara pemerintah dan DPR. Sehingga walau Masyumi merupakan partai terbesar nomor dua dari hasil pemilu 1955 tapi tidak mendapat kedudukan di dalam Kabinet.

Tidak lama kemudian, kira-kira empat bulan setelah partai ini dikucilkan dari DPR-GR, lalu diperintahkan untuk bubar berdasarkan keputusan Presiden nomor 200 tahun 1960 dan nomor 201 tahun 1960, pada tanggal 17 Agustus 1960 yaitu suatu perintah untuk membubarkan partai-partai politik Masyumi dan PSI. ⁴² 82

Salah satu alasan Presiden Soekarno untuk membubarkan partai ini adalah karena partai itu dituduh sedang melakukan pemberontakan, karena pemimpin-pemimpinnya turut serta melakukan dalam pemberontakan pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Republik Persekutuan Indonesia. Atau lebih jelas memberikan bantuan terhadap pemberontakan, sedangkan partai itu tidak resmi menyalahkan perbuatan-perbuatan anggota-anggota pimpinan tersebut. ⁴³ 83

⁴² P dan K, 30 tahun Indonesia Merdeka 1950-1964. PT. Lontoro Gung Persada, Jakarta, 1985, hal. 166.

⁴³ Penetapan Presiden nomor 7/1959 yang mengatur tentang pembubaran suatu partai dilakukan pada tanggal 31 Desember 1959. pasal 9 ayat 1 penpres tersebut menetapkan bahwa : Presiden sudah mendengar Mahkamah Agung dapat melarang/membubarkan partai yang :

1. bertentangan dengan asas dan tujuan negara.
2. programnya bermaksud merobek asas dan tujuan negara
3. sedang melakukan pemberontakan atau telah jelas memberikan bantuan, sedang partai itu tidak dengan resmi menyalahkan perbuatan anggota-anggotanya itu.

Kemudian penpres ini diikuti oleh Kepres. nomor 200 tahun 1960, pada tanggal 19 Agustus 1960 secara resmi Masyumi dan PSI dibubarkan.

Soekarno menghubungkan perintah pembubaran kedua partai itu (Masyumi dan PSI) dengan moral Revolusi. Ia menegaskan "... berdasarkan moral revolusioner dan moralnya, maka penguasa wajib membasmi tiap-tiap kekuasaan asing ataupun tidak asing, pribumi ataupun tidak pribumi, yang membahayakan keselamatan atau berlangsungnya Revolusi".⁴⁴ 99

Perlu kita teliti, adakah bukti-bukti yang otentik yang mendukung bahwa Masyumi sebagai partai terlibat pembontakan daerah. Setelah Masyumi digambarkan ikut terlibat pembontakan PRRI, ditinjau dari sudut historis yang benar harus diakui tidak terbukti. Ketika Natsir, Burhanuddin Harahap dan Sjafruddin Prawiranegara memutuskan diri bergabung dalam PRRI, Masyumi melepaskan ketiganya dari seluruh keterlibatannya dalam partai. Masyumi masih dianggap salah oleh pemerintah, tetapi Masyumi bisa mengerti tindakan Natsir itu. Dan justru kehadiran para tokoh Masyumi di dalam PRRI itu dianggap positif, karena dapat mengerim gerakan itu menjadi separatis total. Dan sebenarnya timbul dari dalam militer yang tidak puas terhadap kebijaksanaan Soekarno yang sudah didominasi PKI.

Dengan perginya Natsir dari Jakarta dan terutama keterlibatannya dalam PRRI pimpinan Masyumi jatuh kepada Prawoto Mangkusasmito bukan pada Sukiman, walaupun Sukiman lebih senior, dan wakil, ketua umum I. Pimpinan Masyumi pada umumnya lebih mempercayakan kelanjutan kebijaksanaan partai kepada Prawoto. Walaupun begitu Sukiman tidak mempunyai ambisi sama sekali untuk mendu-

⁴⁴ Soekarno, Di bawah Bendera Revolusi, dikutip oleh Syafi'i Ma'arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, LP-3 ES, Jakarta, 1985, hal. 188.

duki jabatan. Kalau seandainya pimpinan diserahkan kepada Sukiman, maka ia akan memilih jalan lain. Mungkin ia akan berkompromi dengan Presiden Soekarno. Tetapi Prawoto lebih dekat dengan Natair, dan menganggapnya sebagai kakaknya. Prawoto melihat bahwa pada waktu itu Masyumi berada dalam keadaan yang serba sulit dengan adanya PRRI itu. Prawoto mengetakan, bahwa pemberontakan merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan terhadap demokrasi. Sebagaimana yang telah ditekankan dalam kongres pada tahun 1952 Masyumi ingin mencapai maksud dan tujuannya dengan cara-cara damai dan demokratia. Tapi sebaliknya partai ini juga berpendapat, bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Soekarno dan pemerintah pusat telah melanggar UUD. Antara lain adalah penunjukan dirinya sendiri sebagai formatur dalam tahun 1957, campurtangan Presiden Soekarno dalam hal-hal yang seharusnya diselesaikan oleh kabinet, atau DPR dan Konstituante misalnya pembubaran badan Konstituante dan kembali ke UUD 1945. Presiden Soekarno memaksakan konsepnya sehingga ia menjadi seorang kepala negara konstitusional. Hal-hal yang demikian itu Masyumi tidak setuju sikap dan tindakan pemerintah.⁴⁵

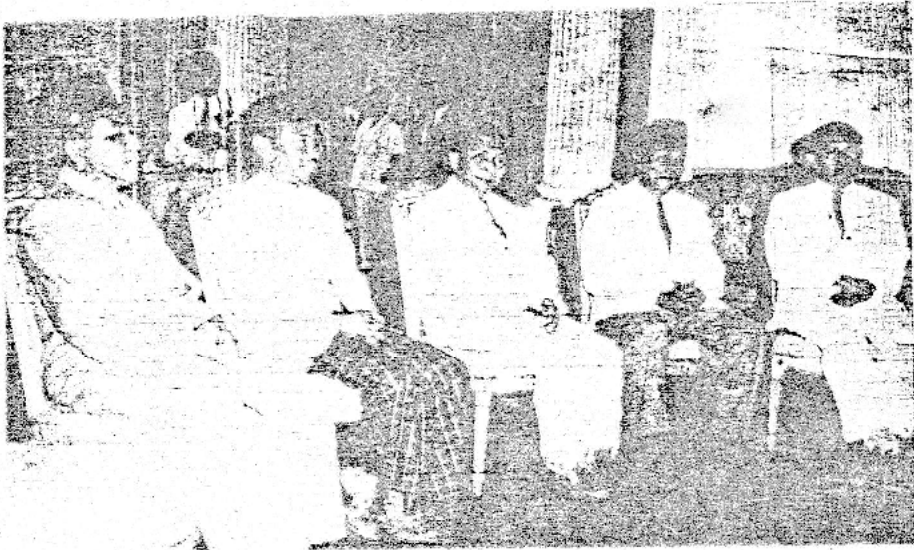
Pada tanggal 21 Juli 1960, Presiden Soekarno memanggil pimpinan Masyumi dan PSI selama 10 menit. Yang pada waktu itu Kepala negara didampingi oleh Kepala staf ketiga Angkatan, Kepala Polisi, Jaksa Agung, Kepala staf Komando perang Tertinggi, Sekretaris Militer dari Komando tertinggi ini, Menteri Penerangan dan Direktur Kabinet Presiden, menyerahkan setumpuk daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh pimpinan partai itu dalam

⁴⁵Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional, Grafiti Pers, Jakarta, 1987, hal. 378 - 379.

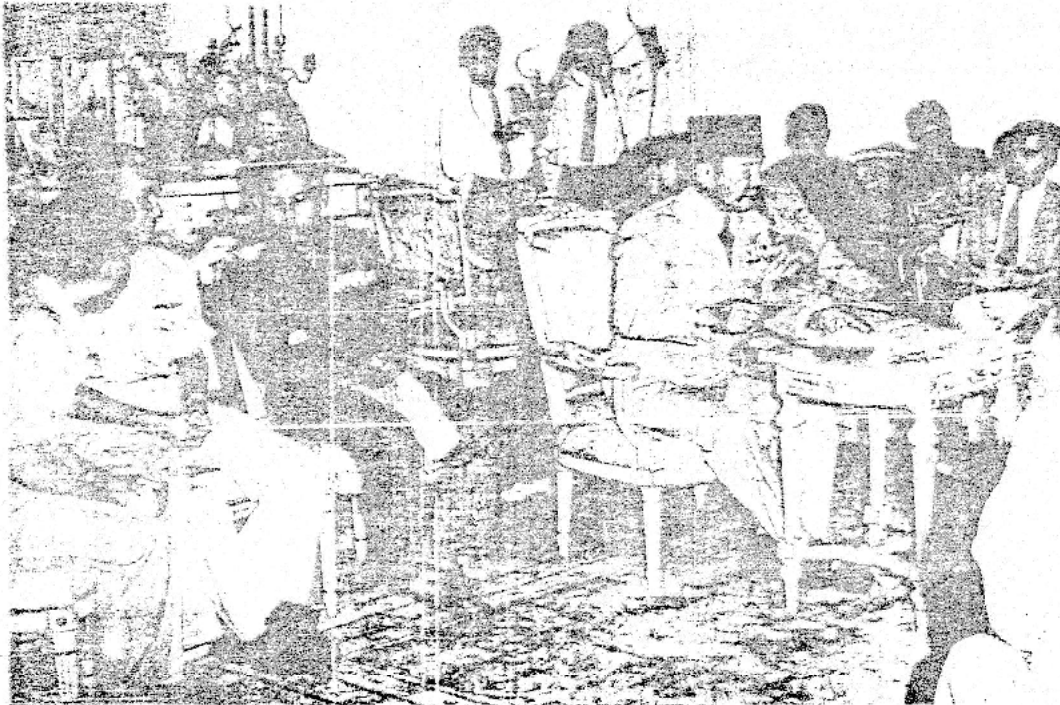
jangka waktu seminggu.

Pimpinan Masyumi yang datang pada waktu itu ialah Prawoto dan Yunan Nasution, sedang pimpinan PSI adalah Syahrir, Soebandrio Sastrosatomo dan TA. Murad. Sukiman yang mempunyai maksud hadir pada waktu itu berada di Yogyakarta.

Pada tanggal 28 Juli 1960 wakil-wakil partai itu bertemu kembali dengan Presiden Soekarno yang juga didampingi oleh para pejabat tinggi kecuali Menteri Pengerangan, Sekretaris Militer Komando Perang Tertinggi, dan Direktur Kabinet Presiden Sekretaris Militer. Presiden kali ini hadir pertemuan ini terjadi selama 7 menit.



Gambar di atas memperlihatkan pimpinan partai Masyumi dan PSI (dari kiri ke kanan) : Yunan Nasution, Prawoto Mangkusasmito, St. Syahrir, Murad dan Subadio Sastrosatomo, Jakarta pada tanggal 24 Juli 1960. Kedua partai tersebut kemudian dinyatakan sebagai partai terlarang.



Pada gambar di atas tampak Presiden Soekarno, di-
damping Staf Penguasa Perang Tertinggi sedang menerima
pimpinan partai Masyumi dan PSI menjelang pembubaran ke-
dua partai tersebut.

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan
kepada Masyumi itu adalah sebagai berikut :

1. Apakah Masyumi menentang dasar dan tujuan negara.
2. Apakah Masyumi bermaksud mengubah dasar dan tujuan
negara.
3. Pertanyaan ketiga ini mengenai keterlibatan Masyumi
dengan pemberontakan PRRI, dan juga berkaitan dengan
ketentuan dalam panpres 7/1959 pasal 9 ayat 1.
4. Apakah Masyumi memenuhi persyaratan lain-lain dari
panpres 7/1959 pasal 9 ayat 1 dan 4.

Menjawab pertanyaan nomor satu dan dua, Masyumi
menyangkalnya dan mengatakan bahwa apa yang menjadi da-
sar dan tujuan negara itu ialah apa yang telah tercantum

dalam mukadimah UUD dan tidak dalam Manipol. Masyumi membandingkan tujuan dan dasar negara itu sehingga sampai pada suatu kesimpulan, bahwa keduanya tidak bertentangan.

Menjawab pertanyaan ketiga, bahwa Masyumi tidak terlibat dalam pemberontakan PRRI. Masyumi mengatakan, bahwa penpres tersebut mulai berlaku tanggal 31 Desember 1959 ketika para pemimpinnya bergabung dengan PRRI, sudah keluar dari Masyumi. Sedangkan pimpinan Masyumi dipilih pada bulan April 1959 dengan tanpa menyebut seorang pun dari orang PRRI, dan sejak tanggal 9 September 1958 Masyumi telah memutuskan hubungan dengan cabang-cabang yang ada di Tapanuli, Sumatra Barat, Riau Daratan, Sulawesi Utara dan Selatan yang telah dibekukan oleh pemerintah pada waktu itu.

Menjawab pertanyaan nomor empat, Masyumi menjawab bahwa waktu yang telah diberikan oleh pemerintah - sampai pada tanggal 31 Desember itu dirasa cukup bagi Masyumi untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh pemerintah kepadanya dulu, tapi kenyataannya Masyumi tidak mendapatkan kesempatan sampai batas yang telah ditentukan tersebut. Di samping itu Masyumi juga menanggapi tentang penpres, bahwa Masyumi kurang setuju karena penggunaan keputusan Presiden dalam bentuk penpres semenjak Juli 1959 itu tidak sesuai dengan UUD 1945. Penpres merupakan pelanggaran UUD, oleh karena itu Masyumi kurang setuju dengan isi surat Presiden kepada Parlemen yang di dalamnya dikemukakan bahwa pemerintah memandang perlu mengadakan beberapa peraturan negara lainnya yakni penetapan Presiden atau penpres. Sebab UUD 1945 tidak mengenal hukum jenis ini. Masyumi mengatakan bahwa itu bertentangan dengan jiwa proklamasi kemerdekaan

an Indonesia.⁴⁶ 46

Akhirnya pada pukul 5.20 pagi tanggal 17 Agustus 1960 pada hari ulang tahun proklamasi Kemerdekaan Indonesia pimpinan Masyumi menerima surat dari Direktorat Kabinet Presiden yang isinya Masyumi harus dibubarkan. Surat itu mengatakan sebagai berikut :

Paduka yang mulia Presiden telah berkenan memerintahkan kepada kami untuk menyampaikan keputusan Presiden (no.200/1960) bahwa partai Masyumi harus dibubarkan dalam waktu 30 hari sesudah tanggal keputusan ini yaitu tanggal 17 Agustus 1960 pimpinan Masyumi harus menyatakan bubar partainya. Pembubaran harus diberitahukan kepada Presiden secepatnya. Kalau tidak, partai Masyumi akan diumumkan sebagai partai terlarang.⁴⁷ 47

Dari uraian di atas jelas bahwa apa yang dilakukan Presiden Soekarno menubuh Masyumi itu dengan beberapa penpresnya untuk menerima persyaratan Manipol Udek dan sebagainya. Semuanya itu dilakukan sebagai balasan dari tindakan-tindakan atau kritikan-kritikan tajam Masyumi sebelumnya. Dan bahwa apa yang dilakukan Presiden itu tidak persoalan atau perhitungan secara hukum, tapi apa yang dilakukan itu hanyalah rasa suka dan tidak suka Presiden Soekarno terhadap Masyumi.⁴⁸ 48

Dan tuduhan bahwa Masyumi sebagai partai terlibat dalam pemberontakan, tidak didukung oleh suatu data yang otentik. Tapi itu tidak penting bagi Soekarno. Karena Soekarno sebagai pemimpin besar Revolusi, maka

⁴⁶ Ibid., hal. 384 - 386.

⁴⁷ Ibid., hal. 386.

⁴⁸ Zulfikar Ghosali, "Masyumi Pelopor Demokrasi", Majalah Serial Media Da'wah, No. 161, Nopember 1987, hal 14.

yang paling penting adalah bahwa si kepala batu yakni Masyumi harus dienyahkan guna melicinkan jalan bagi realisasi sistim politik Demokrasi Soekarno. Inilah sebenarnya logika Revolusi yang ada di belakang keputusan Presiden nomor 200/1960 itu.⁴⁹ Hal inilah yang paling diprihatinkan oleh para pecinta demokrasi. Bahwa apa yang dilakukan oleh Soekarno itu menjerus atau mengiring negara Indonesia ke negara kekuasaan yang otoriter tidak ke negara demokrasi.

Harus diakui selama Demokrasi Terpimpin, bahwa semua komponen eksekutif, legislatif dan yudikatif di bawah kontrol Presiden Soekarno. Maka tidaklah heran kalau ada orang membandingkan, bahwa Soekarno tidak ubahnya sebagai seorang raja yang absolut. S. Takdir Ali Sjabbana misalnya menulis dalam bukunya "Indonesia, Social and Cultural Revolution" yang bunyinya :

Posisi Sukarno sebagai Presiden dan sebagai pemimpin Besar Revolusi Indonesia yang di tengannya terpegang kekuasaan eksekutif, legislatif dan Yudikatif (hanyalah) berbeda sedikit dengan raja-raja absolut masa lampau, yang mengklaim sebagai inkarnasi Tuhan, atau wakil Tuhan di dunia.⁵⁰

Demikian itulah tipe kepenampilan Soekarno, sehingga sulit untuk memegang perbedaan pendapat yang menyangkut soal-soal yang prinsip. Sedang tokoh-tokoh Masyumi seperti Neteir dan sebagainya adalah duri di mata Soekarno. Karena sikapnya yang selalu menentang terhadap Soekarno yang tidak sesuai dengan demokrasi.

Sedangkan mengapa Masyumi harus memilih membubarkan partainya, karena mereka memandang bahwa partai yang dilarang itu akan lebih banyak mengalami kesulitan dan bahaya bagi para anggotanya dibanding dengan partai

⁴⁹ Ahmad Syafi'i Ma'arif, op. cit., hlm. 191.

⁵⁰ Ibid.

yang dinyatakan bubar oleh pimpinannya. Dan bila dinyatakan terlarang maka semua harta benda dan dokumen dokumen akan disita.⁵¹ Dengan pertisbangan itulah para pemimpin Masyumi memilih membubarkan partainya.

D. Kehidupan Partai Islam pada masa Demokrasi Terpimpin

Kelau dilihat dari sudut Konstitusional, Demokrasi Terpimpin di zaman Soekarno adalah sebagai anti tema dari Demokrasi Liberal. Pada masa Demokrasi Liberal, partai-partai politik begitu berkuasa sehingga kepentingan partai tidak jarang mengatasi kepentingan negara dan bangsa secara keseluruhan.

Dengan kembali kepada UUD 1945 Demokrasi Terpimpin mendapatkan landasan Konstitusional untuk beroperasi. Pada saat itu partai politik Islam terbagi menjadi dua kelompok yaitu partai Masyumi dan partai partai yang tergabung dalam Liga Muslimin (NU, PSII, dan Perti). Kedua kelompok partai Islam ini bukan saja punya sikap yang berbeda dalam menilai Demokrasi Terpimpin, tapi bertentangan satu sama lain dengan cara yang sangat tajam. Kelompok pertama dapat kita sebut sebagai pendukung idealisme martir, sedangkan kelompok kedua adalah pendukung ekomodasionisme. Dua sikap ini menurut mereka sama-sama didasarkan atas pertisbangan dan kepentingan agama.⁵²

Pada masa itu ketiga partai Islam NU, PSII dan Perti terus bekerja sama dengan Masyumi di Konstituante sampai Konstituante dibubarkan pada tahun 1959.⁵³

⁵¹ Deliar Noer, op. cit., hal. 388.

⁵² A. Syafli'i Ma'arif, Akung Karsiman, "Islam dan Politik Belah Bambu", Jawa Post, 29 Maret 1988, hal. VII.

⁵³ Deliar Noer, op. cit., hal. 389.

Dengan idealismenya itulah Masyumi selalu menentang terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan Presiden Soekarno, sebab ia berpendangan bahwa dengan Demokrasi Terpimpin itu akan lahir sistem pemerintahan yang diktator. Pada waktu Presiden Soekarno berusaha memasukkan PKI dalam kabinet, Masyumi secara tegas menolaknya. Memang menurut sejarah antara Masyumi dan PKI tidak bisa hidup sekandang. Kalau tidak yang satu hancur ya keduanya harus hancur. Ternyata kemudian kedua partai ini lenyap dari panggung sejarah Indonesia.

Natsir (seorang tokoh Masyumi) pada waktu itu menilai Demokrasi Terpimpin dan tidak pernah percaya terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan dan janji-janji Presiden Soekarno, karena hasil penilaian Natsir itu negatif, maka akhirnya ia memutuskan untuk bergabung dalam PRRI/Permesta turut mengangkat senjata melawan Rezim Demokrasi Terpimpin, sekalipun ternyata kemudian perlawanan PRRI itu tidak menang.

Keikutsertaan tokoh Masyumi dan PSI dalam PRRI/Permesta, dipakai kesempatan oleh PKI untuk menggulingkan partai itu dengan alasan menyamakan kedua partai itu dengan pemberontak, sekalipun secara yuridis tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian target PKI untuk menggulingkan partai itu menjadi kenyataan pada tahun 1960 kedua partai itu (Masyumi dan PSI) dibubarkan dengan keputusan Presiden nomor 200/1960 tentang pembubaran partai. Hal ini disebabkan karena Masyumi tidak dapat menyesuaikan diri atau mengikuti logika Revolusi Soekarno.

Dengan terasingkirnya Masyumi di peta politik Indonesia setelah Demokrasi Terpimpin beroperasi sekitar 15 bulan, misi politik Islam dilakukan oleh Liga Muslimin dengan NU sebagai "Imam politik" partai-partai

Islam selama periode itu NU yang muncul sebagai partai politik setelah memisahkan diri dari Masyumi pada tahun 1952, sejak pemilu 1955 merupakan kekuatan politik ketiga berdasarkan jumlah wakilnya dalam parlemen.

Berdasarkan posisinya dari hasil pemilu itu, NU setelah Masyumi bubar otomatis menjadi partai kedua setelah PNI, sekalipun secara keseluruhan wakil-wakil golongan Islam dalam parlemen menjadi sangat menyusut. Penyusutan ini bagi NU tampaknya tidak begitu memusingkannya, karena tanpa Masyumi NU akan lebih leluasa mengatur perilaku politiknya. Bila bersama Masyumi dengan idealisme martirnya, sering meropotkan NU yang mempunyai sikap akomodatif itu.⁵⁴ Sebetulnya sikap akomodatif NU itu mula-mula dikerjakan dengan ragu-ragu, dan mungkin canggung. Tapi lama-kelamaan seperti kata pepatah, ala bisa karena biasa, mereka pun terbiasa juga, sehingga tari yang dimainkan pun tambah sesuai dengan gendang yang dipukul. Lama-kelamaan sikap bertahan itu semakin kurang diperhatikan, bahkan dapat dikatakan langkah-langkahnya mulai menempatkan mereka pada sifat akomodatif.⁵⁵

Sejak akhir tahun 1960 formula Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis) semakin dipopulerkan oleh Presiden Soekarno dan para penyokongnya terutama PKI. Dalam kerjasama semua ini, NU merupakan kekuatan inti dari golongan agama dalam konsep Nasakom itu. Target yang hendak dicapai oleh Presiden Soekarno dan PKI dengan Nasakom itu adalah memasukkan PKI dalam kabinet, keinginan ini tidak pernah menjadi kenyataan seperti yang

⁵⁴A. Syafi'i Ma'arif, *Akang Karsimin*, loc. cit.,

⁵⁵Deliar Noer, op. cit., hal. 388 - 390.

didanbakakan Soekarno. Walaupun tiga pucuk pimpinan PKI Aidit, MH. Lukman, dan Nyoto dimasukkan dalam kabinet tapi adalah tanpa portfolio.

Masuknya PKI dalam kabinet ini mendapat tantang-an dari parpol Islam terutama NU., tetapi partai ini tidak berani mengkritik Soekarno yang telah merangkul PKI.

Dengan masuknya partai-partai Islam dalam kerje-sane Nasakom, mereka secara formal telah dianggap revolusioner. Sebab pada masa itu, salah satu kriteria apa kah suatu kekuatan politik revolusioner atau kontra re-volusioner bergantung pada sikapnya pada Nasakom. Semakin vokal suatu kekuatan politik dalam menentrikan Na-sakom, ia akan semakin dikategorikan sebagai revolusi-oner, sekalipun cara itu mungkin adalah untuk menyela-matkan diri dari kecurigaan Soekarno dan PKI. Karena Is-lam dipandang sebagai salah satu unsur dari Nasakom dengan NU sebagai wakilnya, maka partai ini tidak perlu cemas akan disingkirkan dari logika Revolusioner Soe-karno, asal pondasi menari sesuai dengan irama dan gen-drang politik yang lagi populer pada waktu itu.

Pada permulaan tahun 1961 Saifuddin Zuhri (Sek-jen NU) menjelaskan bagaimana NU harus berkiprah meng-hadapi realitas politik. Ia mengatakan :

Partai NU telah bertekad, kita harus tampil ke-depan memosuki semua kesempatan yang tersedia, ka-rena biar bagaimana orang menggunakan kesempatan itu akan lebih banyak bisa berbuat dari pada yang berada di luarnya. Politik NU yang didapati oleh unsur agama, pandangannya yang diusah toleransi dan suja, itu telah menggariskan suatu tradisi dan oleh sebab itu akan terus berkembang.⁵⁶

⁵⁶ A. Syafi'i Ma'arif, *Skung Karsima*, loc. cit..

Dibekali oleh asumsi bahwa berada di dalam akan lebih afdhol ketimbang berada di luar, apalagi di dalam itu didapati oleh unsur agama, oleh karena itu Saifuddin Zuhri membantah pendapat yang mengatakan bahwa Islam dalam keadaan bahaya. Ia mengatakan bahwa Islam tidak dalam keadaan bahaya dan itu adalah hasutan semata. Kemudian ia juga mengatakan :

Bahwa NU memandang keadaan pada waktu itu cukup memberikan kesempatan luas bagi pemenuhan hajat dan cita-cita NU, karena Manipol sebagai haluan negara tidak mengurangi cita-cita keyakinan ideologi, sebagai yang dijelaskan di dalam jarek. Padahal semua cita-cita dan tujuan NU merupakan inti daripada aspirasi yang dicarinkan di dalam Manipol Bedek.⁵⁷

Di samping itu Rais 'Am PB NU KH. Wahab Hasbullah berkali-kali menekankan agar NU selalu bersikap akomodatif, menampung dan menghadapi segala persoalan yang berkembang ketika itu dengan penuh kelapangan dada sebagaimana ikan yang hidup di air tawar ataupun asin.⁵⁸

Sikap akomodatif/menyesuaikan diri dengan keadaan ini dilakukan oleh NU adalah suatu upaya agar lebih mudah mendapatkan kesempatan dan memanfaatkan secara efektif khususnya untuk mengimbangi politik PKI.

Usaha mengimbangi politik PKI dilakukan oleh NU di berbagai bidang, termasuk juga bidang ekonomi. KH Saifuddin Zuhri mengatakan bahwa untuk menyehatkan ekonomi nasional ketika itu, NU mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk "National Planning Board" sebagai badan perencanaan menuju ekonomi nasional yang sehat. Dan diusulkan juga agar hal ini dipimpin oleh Drs.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Choirul Anam, op. cit., hal. 231.

Moh. Hatta. Dan ide National Planning Board ini kemudian dikembangkan menjadi "Dipernas", "Bappenas" dan akhirnya menjadi apa yang sekarang kita kenal istilah "Repelita" dan "Pelita".⁹⁹

Di samping itu parpol Islam juga berpartisipasi dalam kabinet dan juga dalam parlemen. Keikutsertaan parpol Islam dalam kabinet yang dimulai dari tahun 1957-1965 itu tidak memberi warna has bagi kabinet tersebut.

Dalam tahun 1957-1959 NU mendapat 4 kursi dan ini merupakan yang terbesar bila dibandingkan dengan partai partai lainnya. Bahkan PHI pada waktu itu hanya mendapatkan 3 kursi. Walaupun begitu NU tidak pernah bisa mempengaruhi kabinet. Hal ini karena keikutsertaan Soekarno dalam pemerintahan secara aktif. Pada waktu itu ketua umum NU Idham Khalid menjadi wakil Perdana Menteri II, Menteri lain yang dipegang oleh NU adalah Menteri perdagangan (Prof. Sunardjo), agama (KH M. Ilyas), dan agraria (Sunarjo). Adapun PSII mendapat 1 kursi yaitu Menteri penerangan (Sudibjo) yang nanti akan diganti oleh Rachmat Muljowiseno. Tahun 1958 NU mendapat satu kursi lagi yaitu Menteri penghubung sipil dan militer (KH. Wahib Wahab).

Dengan pembentukan kabinet presidential 1959-1965 semua Menteri melepaskan hubungannya dengan partai. Tetapi hal ini NU dan PSII seakan-akan tidak berubah. Akhirnya kabinet tahun 1959 ini mengurangi jumlah Menteri NU dan PSII menjadi 3 dan tiga ini yaitu KH. Wahib Wahab (Menteri muda agama), KH. Fatah Yasin (Menteri muda penghubung Ulama') dan Sudibjo (Menteri muda mobilisasi rakyat). Jadi tidak satu pun partai Islam yang diper-

⁹⁹ Ibid., hal. 233.

caya memegang kursi yang penting/kursi inti.

Kabinet Soekarno diubah lagi pada tahun 1960, 1962, 1963 dan 1964 pada tahun 1965 terjadi lagi reshuffle kecil. Pada tahun 1962 KH. Wahib Wahab diganti oleh KH. Saifuddin Zuhri. KH. Fatah Yasin tetap dan Sudibjo setelah terbentuknya Front Nasional, ia menjadi sekretaris Jendral Front Nasional. Kabinet tahun 1960 mempunyai 41 kursi.

Kabinet tahun 1962 mencatat Saifuddin Zuhri, Fatah Yasin dan Sudibjo dalam pos-posnya yang tetap. Kabinet ini mengikutsertakan ketua dan wakil ketua Parlemen dan MPR(S) sebagai Menteri. Dalam kesempatan ini Zainul Arifin (NU) ketua DPR-GR Idham Ghaliid (NU) wakil ketua MPR(S), dan Arudji Kartawinata (PSII) wakil ketua II DPR-GR. Oleh karena kedua badan ini lebih merupakan setempel bagi kebijaksanaan pemerintah, kedudukan pimpinannya sebagai Menteri juga sekedar mempunyai arti simbolis saja. Memang pada masa Soekarno ini peranan partai Islam sangat menurun.

Kabinet tahun 1963 mencatat KH. Saifuddin Zuhri (NU) sebagai Menteri Agama, KH. Fatah Yasin (NU) sebagai Menteri Penghubung Alim Ulama dan Sudibjo sebagai Menteri/Sekretaris Jendral Front Nasional. Dan juga Idham Gholid dan Arudji Kartawinata duduk sebagai Menteri yang *ex officio* seperti pada tahun 1962 dan Achmad Sjaichu, wakil ketua DPR-GR. Kabinet terdiri 61 Menteri.

Pada kabinet terakhir terjadi reshuffle kecil pada bulan Mei 1965 tetapi tidak mengubah kedudukan wakil wakil partai Islam. Pada waktu itu jumlah Mentrianya sebanyak 78.⁶⁰

⁶⁰Deliar Noer, *op. cit.*, hal. 397 - 399.

Perlu diketahui bahwa peranan partai Islam baik di Parlemen maupun di MPR(S), tidak secerah pada DPR hasil pemilu 1955. Jumlah mereka semakin mengecil dan terdapat pada pos-pos yang kurang berperan.

Demikianlah kehidupan partai politik Islam pada masa Demokrasi Terpimpin, kalau mereka mau hidup, maka ia harus menyesuaikan diri dan menuruti terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan Soekarno. Adapun NU dan PSII dan Perti, mereka mengambil sikap yang akomodatif dan menyesuaikan diri dengan mendukung Demokrasi Terpimpin, itu adalah agar mereka dapat hidup. Sehingga mereka akan bisa berjuang dalam rangka menghalau politik yang dilancarkan oleh PKI yang pada waktu itu berada di sisi Presiden Soekarno dan Soekarno sendiri juga condong kepada PKI. Oleh karena itu kalau seandainya partai politik Islam tidak ada yang mau bersikap demikian otomatis mereka akan hilang dari panggung politik Indonesia. Akibatnya PKI akan lebih leluasa di dalam menarikan politiknya dalam Demokrasi Terpimpin. Jadi penerimaan NU, PSII dan Perti terhadap Demokrasi Terpimpin itu adalah atas pertimbangan agama.

Sementara Deliar Noer menilai, bahwa hal itu dilakukan oleh NU, PSII dan Perti adalah atas latar belakang sejarah. Yaitu hubungan mereka terhadap Masyumi tidak terjalin dengan mesra. Untuk Perti ini dimulai tahun 1945/1946 ketika ia berubah menjadi partai politik. Untuk PSII yaitu setelah PSII dihidupkan kembali pada tahun 1947. Dan NU yaitu sejak mereka menjadi partai politik pada tahun 1952. Oleh karena ada kompetisi dengan Masyumi, lambat laun mereka bergantung pada Presiden Soekarno. Di samping itu karena kharismanya Soekarno. Tetapi juga tidak lepas dari pertimbangan agama.⁶¹

⁶¹ Ibid., hal. 404.